S 336-201 407 Mar P 2013

Record: 22159 Reg: 22623

PROSEDUR PENYELESAIAN TUNGGAKAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN PENGARUHNYA TERHADAP TINGKAT TUNGGAKAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) PADA KABUPATEN OGAN ILIR



Skripsi Oleh:

FIONA FEBRIANI MARPAUNG 01091003050 Akuntansi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS EKONOMI

## LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

## PROSEDUR PENYELESAIAN TUNGGAKAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN PENGARUHNYA TERHADAP TINGKAT TUNGGAKAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) PADA KABUPATEN OGAN ILIR

Disusun oleh:

Nama

: Fiona Febriani Marpaung

NIM

: 01091003050

**Fakultas** 

: Ekonomi

Jurusan

: Akuntansi

Bidang Kajian/ Konsentrasi : Perpajakan

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif

Tanggal Persetujuan

Dosen Pembimbing

Tanggal 03 April 2013

Ketua:

Ermadiani, SE, MM, Ak NIP 19660820 199402 2 001

Tanggal: 02 April 2013

Anggota:

Dewi Rina Komarawati, SE, MM, Ak

NIP 19620913 199403 2 001

## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

## PROSEDUR PENYELESAIAN TUNGGAKAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN PENGARUHNYA TERHADAP TINGKAT TUNGGAKAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) PADA KABUPATEN OGAN ILIR

## Disusun oleh:

Nama

: Fiona Febriani Marpaung

NIM

: 01091003050

**Fakultas** Jurusan

: Ekonomi : Akuntansi

Bidang Kajian/ Konsentrasi : Perpajakan

Telah di uji dalam ujian komprehensif pada tanggal 25 Juni 2013 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

> Panitia Ujian Komprehensif Inderalaya, 26 Juni 2013

Ketua

Anggota

Anggota

Ermadiani, SE,MM, Ak

Dewi Rina Komarawati, SE,MM, Ak H. Aspahari, SE,MM, Ak

NIP.196608201994022001 NIP.196209131994032001

NIP.19660 041992031004

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi

Ahmad Subeki, SE, MM, Ak NIP. 196508161995121001

## SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa

: Fiona Febriani Marpaung

NIM

: 01091003050

Jurusan

: Akuntansi

Bidang Kajian

: Perpajakan

Fakultas

: Ekonomi

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul : PROSEDUR PENYELESAIAN TUNGGAKAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN PENGARUHNYA TERHADAP TINGKAT TUNGGAKAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) PADA KABUPATEN OGAN ILIR

Pembimbing:

Ketua

: Ermadiani, SE, MM, Ak

Anggota

: Dewi Rina Komarawati, SE, MM, Ak

Tanggal Ujian: 25 Juni 2013

adalah benar hasil karya Saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan Saya ini tidak benar dikemudian hari, Saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaan.

Inderalaya, 26 Juni 2013
Pembuat Pernyataan,

Fiona Febriani Marpaung NIM. 01091003050

#### KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus atas perlindungan dan kasih-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul PROSEDUR PENYELESAIAN TUNGGAKAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN PENGARUHNYA TERHADAP TINGKAT TUNGGAKAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) PADA KABUPATEN OGAN ILIR. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini membahas mengenai bagaimana tindakan atau prosedur yang akan dilakukan dalam menyelesaikan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan pengaruhnya, yang studi kasusnya dilakukan pada Kabupaten Ogan ilir. Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai kendala. Kendala tersebut dapat diatasi berkat bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada:

- 1. Prof. Dr. Hj. Badia Perizade, M.B.A selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
- 2. Prof. Dr. H. Syamsurijal, Ak, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
- 3. Ahmad Subeki, S.E., M.M., Ak. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
- 4. Mukhtaruddin S.E, M.Si, Ak, Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
- 5. Ermadiani, SE,MM, Ak., selaku Pembimbing I yang telah memberikan petunjuk, bimbingan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
- 6. Hj. Dewi Rina Komarawati, S.E., M.M., BKP, Ak., selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi.
- 7. Para dosen penguji yang telah membantu memberikan kritik dan saran.
- 8. Hj. Rochmawati Daud, SE, M.Si, Ak selaku Dosen Pembimbing Akademik.
- 9. Seluruh dosen beserta staff dan karyawan yang ada di Fakultas Ekonomi.
- 10. Pimpinan beserta karyawan di Kantor Samsat Kabupaten Ogan Ilir dan Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang telah bersedia diwawancarai dan memberikan data yang penulis perlukan dalam menulis skripsi ini.
- 11. Almamaterku Universitas Sriwijaya.
- 12. Seluruh teman-teman Ak'09 (yang tidak dapat diucapkan satu per satu) yang telah sama-sama berusaha dan berjuang untuk menyelesaikan studi dengan baik. Terima kasih untuk indahnya kebersamaan selama duduk di bangku kuliah.

- 13. Sahabat-sahabatku DTG5; Elisabeth Sihotang (Bebeth), Piri Jelita Siahaan (Jeje), Piri Tamy "Hutagaol" (Pirtam), Lestari Simanjuntak (Iyez/TarPar), Leo Agung, Baginda, dan Indo. Yang telah memberikan doanya, semangat, dan dukungan yang cukup menguatkanku.
- 14. Orang-orang yang disekitarku; Wyga Lumbangaol, Yosephin Simbolon, Alisia Malau, Hetty, Keluarga Besar Sonakmalela Unsri, Keluarga Besar Parna Unsri, Keluarga Besar Gpdi (SAP) Lorok, dan orang-orang lainnya yang belum sempat saya ucapkan satu-persatu, yang telah memberikan dukungan doa dan semangat yang begitu berharga.
- 15. Bang Nikson Siagian yang udah membantu dan menemaniku dalam mencari data, memberikan semangat, dukungan dan doanya.
- 16. Adik-adikku tersayang ; Fransiska Marpaung, Julia Marpaung, Tua Raja Marpaung, Elisabeth Marpaung; dan untuk keluargaku semua yang udah memberikan dukungan baik moral dan materi, dan doa selalu yang selalu menguatkan aku.
- 17. Yang terutama untuk kedua Orang tua ku yang sangat aku sayangi dan kasihi, yang sudah begitu baik membesarkan saya dan mendidik saya dalam hal moral dan rohani; yang juga telah mendukung memberikan semangat, membantu dalam hal moral, doa, dan materi sehingga saya dapat kuat dan tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi saya hingga selesai. I love you Mom and Dad.
- 18. Dan yang terlebih ucapan syukurku dan sembahku kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Bapa dan Gembalaku, yang telah menopangku dalam susah dan senang. Thank's God

Inderalaya, 23 Maret 2013

Penulis

### **ABSTRAK**

## PROSEDUR PENYELESAIAN TUNGGAKAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN PENGARUHNYA TERHADAP TINGKAT TUNGGAKAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) PADA KABUPATEN OGAN ILIR

Oleh :
Fiona Febriani Marpaung
Ermadiani, SE, MM, Ak
Hj. Dewi Rina Komarawati, S.E, M.M, BKP, Ak.

Pada saat ini dapat dilihat begitu tingginya tingkat tunggakan PKB yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Untuk itu peneliti ingin meneliti bagaimana prosedur yang dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan tunggakan PKB apakah sudah cukup baik atau tidak, dan melihat bagaimana pengaruhnya terhadap tingkat tunggakan PKB itu sendiri. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dimana akan menggunakan analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Dimana analisis kuantitatifnya akan menggunakan uji t-test. Penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur penyelesaian tunggakan PKB yang dilakukan oleh pemerintah sudah cukup baik, namum masih saja terjadinya peningkatan tunggakan PKB pada-Kabupaten Ogan Ilir dari tahun 2006-2012. Untuk itu pemerintah melaksanakan program pemutihan tunggakan denda PKB berdasarkan pada Pergub No. 29 Tahun 2012. Dari hasil sementara berdasarkan grafik, tingkat tunggakan PKB setelah dilaksanakannya pemutihan denda tunggakan PKB mengalami penurunan. Namun berdasarkan uji t-test yang telah dilakukan tingkat tunggakan PKB sebelum dan setelah dilaksanakannya Pemutihan denda tunggakan PKB tidak terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan, yang dimana artinya penurunan tingkat tunggakan PKB yang terjadi ini tidak dapat diberlakukan untuk seluruh Wajib Pajak yang ada di Kabupaten Ogan Ilir dimana sampel ini di ambil.

Kata kunci: Pajak Daerah, pemutihan pajak, tunggakan pajak

#### ABSTRACT

## SETTLEMENT PROCEDURES TAX ARREARS MOTOR VEHICLE (PKB) AND EFFECT ON THE LEVEL OF MOTOR VEHICLE DELINQUENT TAX (PKB) AT OGAN ILIR

# Oleh : Fiona Febriani Marpaung Ermadiani, SE, MM, Ak Hj. Dewi Rina Komarawati, S.E, M.M, BKP, Ak.

At this time it can be seen that the high level of arrears PKB's in Ogan Ilir regency. To the researchers wanted to examine how the procedure is done by the government in resolving the PKB arrears if it is good enough or not, and see how they affect the level of arrears PKB itself. This research is a descriptive study which will use qualitative analysis and quantitative analysis. Where quantitative analysis will use the t-test. This study suggests that PKB arrears settlement procedure conducted by the government has been quite good, but still only an increase in delinquent tax value Ogan Ilir regency from years 2006 to 2012. To implement the program, the government bleaching delinquent fines of PKB based on Governor Regulation No. 29 in 2012. From the preliminary results based on the chart, the level of arrears of PKB after the implementation-bleaching PKB decreased delinquent fines. However, based on t-test was done before the PKB arrears levels and arrears after the implementation of collective fines Bleaching no differences significant effect, which means that the decrease in the level of arrears occurring PKB can not be applied to all taxpayers in the district of Ogan Ilir where the sample is taken.

Key words: Regional Taxes, bleaching taxes, arrears taxes

## DAFTAR ISI

**\31330**0 3 JUL 2013

TANGGAL:

	ANTAR			300
ABSTRAK (E	BAHASA INDONESIA DAN INGGRIS)			iii
DAFTAR TA	BEL		1	viii
DAFTAR GA	MBAR			ix
	AHULUAN		,	1
,1.1. Latar l	Belakang			1
	usan Masalah			
1.3. Tujuar	Penelitian	æ'		6
1.4. Manfa	at Penelitian			6
1.5. Sistem	atika Pembahasan			7
BAB II TINJ	AUAN PUSTAKA			9
	ndasan Teori			
	2.1.1. Theory of Reasoned Action			9
	2.1.2. Pajak			10
	2.1.3. Fungsi Pajak			12
	2.1.4. Perlawanan terhadap Pajak			13
	2.1.5. Pembagian Hukum Pajak			14
	2.1.6. Cara Pemungutan Pajak			15
	2.1.7. Sistem Pemungutan Pajak			16
	2.1.8. Asas Pemungutan Pajak			17
	2.1.9. Tarif Pajak			18
	2.1.10. Pembagian Paiak			18

4	
2.2. Pajak Daerah	20
2.2.1. Jenis-jenis Pajak Daerah	23
2.3. Pajak Kendaraan Bermotor	24
2.3.1. Objek, Subjek, dan Wajib Pajak Kendaraan	*
Bermotor (PKB)	25
2.3.2. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	26
2.4. Penelitian Sebelumnya	28
2.5. Hipotesis	32
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Ruang Lingkup Penelitian	33
3.2. Rancangan Penelitian	33
3.3. Sumber Data	34
3.4. Metode Analisa	
*	
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
4.1.1. Sejarah Ogan Ilir	38
4.1.2. Kondisi Geografis dan Iklim	43
4.1.2.1. Keadaan Geografis Daerah	43
4.1.2.2. Keadaan Iklim	44
4.1.2.3. Penggunaan Lahan	44
4.1.3. Visi dan Misi Pembangunan	47
4.1.3.1. Visi	47
4.1.3.2. Misi	49
4.1.4. Perekonomian	50

•	
4.1.5. Gambaran Umum Dispenda Sumsel UPTD	
Kabupaten Ogan Ilir	54
4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan	56
4.2.1. Tata cara penetapan Pajak Kendaraan Bermotor	56
4.2.2. Prosedur penyelesaian tunggakan Pajak	
Kendaraan Bermotor	58
4.2.3. Pengaruh Pergub Nomor 29 Tahun 2012	61
4.2.4. Uji t-test untuk pengujian atas pemutihan tunggakan	
·PKB	64
**	
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	67
5.1. Kesimpulan	67
5.2. Saran	68
Daftar Pustaka	69
Lampiran-lampiran	

## DAFTAR TABEL

Hal	aman
Tabel 1.1. Tingkat Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor pada  Kabupaten Ogan Ilir	5
Tabel 4.1. Luas Penggunaan Lahan di Kabupaten Ogan Ilir	****
Tahun 2010-2011	46
Tabel 4.2. Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Ogan  Ilir Tahun 2006 sampai 2011 menurut sektor lapangan usaha	53
Tabel 4.3. Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dari tahun	
2006-2012	. 53
Tabél 4.4. Tabel tingkat tunggakan PKB pada Kabupaten Ogan Ilir	
dari Maret 2012-Februari 2013	62
Tabel 4.5. Tingkat tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor sebelum dan	
sesudah dilaksanakannya Pemutihan Denda Pajak Kendaraan	
Bermotor (Pergub Nomor 29 Tahun 2012)	. 65

## DAFTAR GAMBAR

## Halaman

Gambar 2.1. Struktur Pajak di Indonesia; Pembagian Pajak menurut Pemungutnya	20
Gambar 4.1. Grafik Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Ogan Ilir tahun 2005 sampai 2011	51
Gambar 4.2. Gambaran Umum Dispenda Sumsel UPTD  Kabupaten Ogan Ilir	55
Gambar 4.3. Gambar diagram alur pemungutan Pajak  Kendaraan Bermotor	
Gambar 4.4. Diagram alur prosedur penyelesaian tunggakan Pajak  Kendaraan Bermotor	60
Gambar 4.5. Grafik Tingkat Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kabupaten Ogan Ilir dari tahun 2006-2012	61
Gambar 4.6. Garafik tingkat tunggakan PKB pada Kabupaten Ogan Ilir dari Maret 2012-Februari 2013	63

## **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

## 1.1.Latar Belakang

Sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tujuan Bangsa Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selain itu, Negara Indonesia merupakan salah satu Negara yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu negara menempatkan pajak sebagai suatu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam gotong-royong nasional serta dalam memajukan kesejahteraan umum, yang merupakan peran serta dan kewajiban masyarakat dalam pembiayaan pembangunan nasional.

Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan hak dan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan. Sedangkan, tugas-tugas pemerintah daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan dekonsentrasi dan penyelenggaraan tugas pembantuan telah diatur pula pada Peraturan Pemerintah Dekonsentrasi dan Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.

Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur dengan melalui peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat. Dalam rangka mewujudkan tujuan dari pembangunan nasional, maka pelaksanaan pembangunan harus merata diseluruh Tanah Air ini dan ini juga tidak terlepas dari adanya pembangunan daerah yang juga merupakan bagian yang sangat penting dari pembangunan nasional.

Pemerintah Daaerah berusaha mengembangkan dan meningkatkan perannya baik dalam bidang ekonomi dan keuangan. Dalam rangka meningkatkan peran penyelenggaraan pemerintah tersebut baik melalui pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat sekaligus sebagai upaya peningkatan stabilitas politik, sosial, ekonomi dan kesatuan bangsa, maka pemberian otonomi daerah kepada kabupaten/ kota yang nyata merupakan jalan lebar yang harus kita sambut dengan positif.

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat mempunyai kepentingan yang sama dalam hal penyelenggaraan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Pemerintah Daerah juga membutuhkan biaya dan dana untuk pembangunan daerah. Dalam rangka mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata, pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah bersumber pada Pendapatan Asli Daerah itu sendiri. Daerah diberi wewenang untuk menggali sumber dana yang sesuai dengan potensi dan keadaan daerah masing-masing, sehingga

nantinya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah itu sendiri untuk membiayai rumah tangganya sendiri.

Penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah terdiri dari 4 (empat) jenis pungutan yakni pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan laba BUMD dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Salah satu sumber utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan yaitu pajak. Sehingga dalam pelaksanaannya sektor perpajakan diatur melalui sistem dan beserta Undangundang yang telah ditetapkan. Melalui sistem tersebut diharapkan pengadaan pembangunan nasional melalui sektor pajak dapat dimaksimalkan penggunaannya demi untuk kepentingan bersama. Peran serta yang tinggi dari masyarakat Indonesia dalam membayar pajak sangat diharapkan untuk meningkatkan semua sektor, karena pada hakekatnya pajak yang dibayarkan masyarakat ke kas negara akan dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang kesejahteraan masyarakat Indonesia seluruhnya agar adil dan makmur.

Pemungutan Pajak Daerah merupakan suatu perwujudan dari pengabdian dan peran wajib pajak untuk langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan Negara dan Pembangunan Nasional. Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Peranan pajak sangatlah penting bagi penerimaan kas

negara oleh karena itu Pemerintah terus berusaha meningkatkan dan menggali setiap potensi pajak yang ada.

Menurut Perda Sumatera Selatan Nomor 3 tahun 2011 tentang Pajak Daerah menyatakan bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak daerah ada pada anggota masyarakat wajib pajak itu sendiri. Pemerintah dalam hal ini aparatur perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang telah digariskan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Akan tetapi dalam penulisan ilmiah ini, penulis hanya akan menjabarkan dan menganalisis Pajak Kendaraan Bermotor yang merupakan salah satu Pajak Daerah khususnya pajak daerah provinsi yang memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pendapatan pemerintah daerah yang dimana saat ini perkembangan penggunaan kendaraan bermotor sudah sangat meningkat. Analisis tersebut dilakukan karena diketahui bahwa begitu besar tunggakan pajak kendaraan bermotor pada daerah Sumatera Selatan khususnya Kabupaten Ogan Ilir saat ini.

Dimana dapat kita lihat data tingkat tunggakan pajak kendaraan bermotor Kabupaten Ogan Ilir Sebagai berikut :

Tabel 1.1. Tingkat Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kabupaten Ogan Ilir

Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Tunggakan PKB Pokok	Tunggakan Denda PKB	Jumlah Tunggakan
2006	718	58.717.500	28.776.600	87.494.100
2007	2.494	218.154.150	106.912.750	325.066.900
2008	2.656	273.441.275	134.008.975	407.450.250
2009	3.972	425.736.125	208.647.525	634.383.650
2010	3.869	500.388.775	244.186.050	744.574.825
2011	6.025	960.361.850	311.089.875	1.271.451.725
2012	10.152	1.743.219.875	613.283.400	2.356.503.275

Sumber: Kantor SAMSAT Prov. Sumsel Kabupaten Ogan Ilir

Sedangkan diperkirakan, tunggakan pajak kendaraan bermotor, baik mobil maupun sepeda motor di Sumatera Selatan pada tahun 2012 mencapai Rp 214,9 miliar (Sriwijaya Post). Dan khususnya pada daerah Kabupaten Ogan Hir yang merupakan kabupaten yang baru bertumbuh pada Provinsi Sumatera Selatan juga memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor di tahun 2012 yang cukup besar yaitu mencapai hingga 2,35 miliar. Untuk itu, penulis ingin melihat bagaimana peranan Kabupaten Ogan Ilir dalam menyelesaikan tunggakan pajak kendaran bermotor tersebut dengan melakukan penelitian dalam membuat penulisan yang PENYELESAIAN **TUNGGAKAN PAJAK** "PROSEDUR berjudul KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN PENGARUHNYA TERHADAP TINGKAT TUNGGAKAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) PADA KABUPATEN OGAN ILIR"

## 1.2.Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dibuat perumusan masalah sebagai berikut:

- Bagaimana prosedur penyelesaian tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Ogan Ilir.
- Bagaimana pengaruh pelaksanaan pemutihan Denda atas Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (Pergub Nomor 29 Tahun 2012) terhadap tingkat tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor.

## 1.3. Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui bagaimana prosedur penyelesaian tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kabupaten Ogan Ilir.
- Untuk melihat bagaimana peranan pengaruh pelaksanaan Pemutihan
   Denda atas Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (Pergub Nomor 29
   Tahun 2012) terhadap tingkat tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor.

## 1.4. Manfaat Penelitian

- Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang pendapatan daerah Kabupaten Ogan Ilir.
- Sebagai bahan studi dan tambahan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa
   Fakultas Ekonomi terutama Jurusan Akuntansi yang ingin melakukan penelitian.

 Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya pihak pemerintah Kabupaten Ogan Ilir untuk kebijakan pengelolaan pendapatan daerah.

## 1.5. Sistematika Penelitian

Adapun sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini akan disajikan kedalam lima bab yang dapat diringkas sebagai berikut :

## BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan apa yang melandasi atau mendasari penulis untuk melakukan penelitian ini, yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika skripsi.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai teori-teori dan konsepkonsep yang berhubungan dengan penelitian serta penulisan skripsi ini, yang terdiri dari landasan teori yang berhubungan dengan variabel yang di bahas dalam penelitian ini, dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.

## BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan membahas mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi ruang lingkup penelitian, rancangan penelitian, sumber data, populasi dan sampel, defenisi operasional dan pengukuran variabel, dan teknik analisis.

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diawali dengan menguraikan gambaran umum potensi Kabupaten Ogan Ilir beserta tinjauan singkat Perekonomian Kabupaten Ogan Ilir, disertai dengan hasil penelitian dan pembahasan dari hasil penelitian tersebut.

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini penulis akan menyampaikan simpulan yang merupakan rangkuman dari hasil penelitian yang sesuai dengan perumusan masalah yang dibahas dan disertai dengan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait.

#### DARTAR PUSTAKA

- Apsari, N. 2012. "Pengaruh Intensif Pajak BBN KB terhadap Jumlah Wajib pajak Kendaraan Bermotor yang Terhadap di Surabaya Barat". Jurnal
- Asih, W. 2009. "Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) Kabupaten Malang". Jurnal
- Asri, S. 2008. "Pengaruh Pengembangan Aparatur terhadap Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Pelanggan (Studi pada Kantor Samsat Dinas Pendapatan Daerah Prov. Kaltim". Jurnal Borneo Administrator, Volume 4 No. 1.
- Bedjo, 30 Agustus 2012. "Pemutihan Pajak Selama Setahun", Sriwijaya Post.
- Elmi, Bachrul, 2002. Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- IAI. 2012. Modul pelatihan Pajak Terapan Brevet A dan B Terpadu. Jakarta
- Kuncoro, M. 2001. Metode Kuantitatif, Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi. Yogyakarta: AMP YKPN.
- Mulyanto. 2002. "Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kawasan Subosuka Wonosraten Propinsi Jawa Tengah". Jurnal
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Julak Perda No. 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pembebasan Denda Atas Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Dekonsentrasi dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.
- Republik Indonesia, UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia, UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
- Republik Indonesia, UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- Said, Bahtiar. "Peran pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap penerimaan pendapatan asli daerah (studi kasus pada unit pelayanan PKB dan BBN-KB Samsat Propinsi DKI Jakarta 1997-2001)". Tesis. UI.
- Soekristiono. 2003. "Kontribusi Tax Effort, Efektivitas dan Efisiensi Pajak Kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Jawa Tengah pada Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kabupaten Blora". Tesis. Universitas Diponegoro Semarang.
- Sugiyono. 2007. Statistika untuk Penelitian. Bandung: CV ALFABETA.
- Sunaryo. "Strategi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB/ BBN-KB) dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada UPTD Kota Prabumulih". Jurnal
- Supranto, J. 2009. Statistik, Teori dan Aplikasi. Jakarta: Erlangga.
- T. A. Vichy, "Efektivitas Pelayanan Publik pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kota Makasar". Tesis. Universitas Hasanuddin.
- Widodo, H. "Tinjauan terhadap Pelaksanaan Pungutan Pajak Kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)". Tesis. Universitas Diponegoro.